

MEDIA SIBER SEBAGAI ALTERNATIF JEMBATAN KOMUNIKASI ANTARA RAKYAT DAN PEMIMPINNYA

CYBER MEDIA AS AN ALTERNATIVE COMMUNICATION BRIDGE BETWEEN THE PEOPLE AND THE LEADER

Nina Andriana

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta

E-mail: andriana1183@yahoo.com

Diterima: 16 Juli 2013; direvisi: 22 Agustus 2013; disetujui: 29 Desember 2013

Abstract

Deliberative democracy, is an opportunity for people to dialogue with their leaders continuous, needs a free public sphere that independent from political pressure. The public sphere in conventional media which lack owners and content diversity become the turning point another media attendance, that is cyber media. The utilization of cyber media by actor and political institution, and especially by the Indonesian people still not maximum, even cyber media give an opportunity for as communication media which "inclusive, egalitarian and liberal". Two way communication that provided by the cyber media is more interactive among the people and the leader. Through public sphere deliberative democracy on cyber media, public could be educated for rational and open dialogue to discuss about public policy.

Keywords: *Deliberative Democracy, Public Sphere, Cyber Media.*

Abstrak

Demokrasi deliberatif, yaitu terbukanya peluang bagi masyarakat untuk secara kontinu berkomunikasi dengan pemimpinnya, membutuhkan ruang publik yang bebas dari tekanan politik dan penguasa pasar media. Ruang Publik di media massa konvensional yang telah mengarah pada ketiadaan keberagaman kepemilikan dan keberagaman substansi informasi menjadi titik balik hadirnya ruang publik pada bentuk media lain, yaitu media siber. Pemanfaatan media siber oleh lembaga dan aktor politik, dan khususnya oleh masyarakat di Indonesia masih belum maksimal, meskipun media siber memberikan peluang menjanjikan sebagai saluran komunikasi yang "inklusif, egaliter dan bebas tekanan". Prinsip komunikasi dua arah yang disediakan oleh media siber diharapkan mampu menjadi alternatif jembatan komunikasi yang lebih interaktif antara rakyat dan pemimpinnya, yang hal ini sulit didapatkan pada media konvensional. Melalui ruang publik demokrasi deliberatif rakyat dapat dididik untuk berdiskusi secara rasional dan terbuka untuk membicarakan persoalan-persoalan kebijakan publik.

Kata kunci: Demokrasi deliberatif, Ruang Publik, Media Siber.

Pendahuluan

Salah satu wujud nyata penting dalam melembagakan demokrasi adalah pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. Melalui media massa, kebebasan dalam berpendapat, berdiskusi dan berdialog yang mengarah pada penerapan demokrasi berkelanjutan (demokrasi deliberatif) dalam rangka kontrol terhadap penguasa, diharapkan dapat dicapai. Ciri demokrasi yang baik seyogyanya tidak hanya berhenti pada keterlibatan rakyat secara langsung pada pemilihan umum dalam rangka pergantian kekuasaan, namun juga mampu tetap memberikan jembatan atau saluran antara rakyat dengan wakil-wakil di parlemen ataupun pemimpin negara yang telah mereka pilih. Media massa (pers bebas) sebagai salah satu dari enam lembaga politik demokrasi¹ – partai politik, pemilihan umum, parlemen, eksekutif, yudikatif dan pers bebas - diharapkan mampu menjawab harapan masyarakat akan hadirnya ranah publik yang bercirikan demokrasi deliberatif tersebut.

Dalam kondisi ideal, partai politik seharusnya menjadi lembaga yang mengadakan hubungan yang kontinu antara masyarakat pada umumnya dan pemimpin-pemimpinnya², namun dalam prakteknya hingga saat ini partai politik tetap cenderung lebih mengedepankan kepentingan partainya dan sering mengabaikan fungsi sebagai lembaga agregasi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik sebagai lembaga yang mampu menjembatani masyarakat dan pemimpinnya menjadi sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dari Temuan Global Corruption Barometer 2013 (GCB 2013) yang menempatkan parlemen dan partai politik sebagai lembaga yang korup dalam persepsi dan pengalaman masyarakat³. Kondisi ketidakpercayaan publik terhadap parlemen

dan partai politik inilah yang menyebabkan masyarakat mencari alternatif media atau lembaga lain dalam menyuarakan pendapatnya. Seperti disampaikan sebelumnya, media massa dengan jargon kebebasan bersuara dianggap layak untuk memenuhi harapan masyarakat sebagai saluran komunikasi antara mereka dengan pemimpinnya.

Namun, ketidakpercayaan masyarakat terhadap parlemen dan partai politik pun dalam perkembangannya juga dialami oleh media massa. Perkembangan kepemilikan media di Indonesia yang saat ini berpusat pada pemilik-pemilik modal tertentu, tampaknya masih sangat jauh dari impian menghadirkan ruang publik politis yang inklusif, egaliter dan bebas tekanan. Tidak adanya keberagaman dalam kepemilikan media (*diversity of ownership*) akan mengarah pada ketiadaan keberagaman dalam isi pemberitaan media (*diversity of content*).⁴ Kondisi kepemilikan media seperti ini secara langsung atau tidak, akan membentuk atau menggiring opini masyarakat yang sesuai dengan ide dari pemilik media. Ruang kebebasan untuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah lewat media massa juga akan terbelenggu oleh pemilik media yang notabene adalah bagian dari elit politik. Sehingga, apapun aspirasi yang bertentangan dengan kepentingan politik pemilik media, tentu tidak dapat didiskusikan atau bahkan disuarakan lewat media tersebut.

Perumusan Masalah

Kondisi terhambatnya masyarakat untuk dapat mendiskusikan pendapatnya lewat media massa *mainstream* saat ini sebagai akibat adanya penguasaan isi media oleh si pemilik, memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kekuatan publik yang ingin menjalankan haknya untuk mengawasi pemerintah. Harapan media massa sebagai saluran yang demokratis pun jauh dari kenyataan karena publik menganggap

¹ Mochtar Pabottingi, *Lima Palang Demokrasi Satu Solusi: Rasionalitas dan Otorisitas dari Sisi Historis-Politik di Indonesia*. Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama Puslitbang Politik dan Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2002.

² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 120.

³ <http://www.ti.or.id/index.php/publikation/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>, diakses pada tanggal 3 Desember 2013.

⁴ Yanuar Nugroho, peneliti dari The University of Manchester, mengatakan industri media massa di Indonesia menunjukkan tren pemusatan kepemilikan. MNC Group di bawah bendera Global Mediacomm, Jawa Pos Group, dan Kelompok Kompas Gramedia menempati ranking tiga terbesar kepemilikan media. “Ketiga kelompok tersebut menguasai 77 persen peta kepemilikan media di Indonesia,” <http://www.tempo.co/read/news/2014/05/22/090579547/Industri-Media-Massa-Makin-Terkonsentrasi>, diakses pada tanggal 25 September 2013.

media tidak membuka aksesnya kepada publik sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap akurasi informasi dan opini yang terbentuk di media massa tersebut. Meskipun media massa, parlemen dan partai politik senyatanya ada sebagai lembaga politik demokratis yang seharusnya meng-agregasi aspirasi masyarakat, namun kondisi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga media dan parlemen, dirasakan belum mampu mengakomodasi respon, argumentasi, dan kritik masyarakat. Kondisi inilah yang menciptakan adanya sebuah keinginan untuk mencari saluran lain atau teknologi komunikasi lain yang seyogyanya dapat memberikan ruang bagi publik untuk dapat mengawasi jalannya pemerintahan terpilih dalam kondisi yang bebas dan jauh dari tekanan. Lalu media apakah yang mampu menjembatani rakyat dan pemimpinnya, dengan mengedepankan prinsip egaliter, inklusif dan bebas tekanan tersebut?

Perkembangan teknologi komunikasi menghadirkan sebuah perangkat teknologi baru dalam dunia komunikasi. Teknologi ini mampu menggabungkan tiga aspek dalam satu medium, yaitu telekomunikasi, data komunikasi dan komunikasi massa.⁵ Satu karakteristik penting sebagai efek munculnya media baru ini adalah media interaktif, yaitu di mana khalayak dapat dimungkinkan untuk melakukan umpan balik secara langsung terhadap informasi yang disajikan. Teknologi baru ini dalam beberapa literatur akademik memiliki penamaan yang beragam, seperti media *online*, *digital media*, media virtual, *e-media*, *network media*, media baru, media siber dan media *web*.⁶ Khusus dalam tulisan ini, istilah media siber lebih dipilih karena akan mampu memberikan cakupan pembahasan tak hanya pada media itu sendiri tetapi juga media baru sebagai lingkungan,

budaya, politik dan ekonomi.

Berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh media baru di atas, ditambah dengan kepemilikan informasinya yang bersifat massal, dapat menjadikannya sebagai saluran alternatif kebebasan bersuara dan mengkritik pemerintah oleh publik. Hal ini dapat dilihat pada salah satu bentuk dari media siber yaitu media sosial (*social media*) di mana publik dengan bebas dan tanpa rasa takut atas tekanan negara atau pemilik modal mengutarakan kritiknya terhadap persoalan-persoalan kebijakan publik.

Seperti apakah gambaran ruang publik yang ada di media siber Indonesia dalam menjembatani publik dan pemimpin serta elit politik demi memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang telah disepakati oleh elit pada saat UUD 1945 diamandemen? Lalu, apakah kebebasan dalam memproduksi dan mengonsumsi informasi di media siber dapat memberikan peluang untuk hadirnya ruang publik yang dirasakan masyarakat kurang mendapatkan tempat pada media konvensional di Indonesia?

Melalui tulisan ini, akan dikaji secara singkat gambaran kondisi ruang publik demokrasi deliberatif di beberapa bentuk media siber dengan menganalisis situs (*situs*) milik politisi partai, lembaga legislatif dan media sosial (*social media*) milik pemimpin negara ini (Presiden Soesila Bambang Yudhoyono). Pemilihan bentuk media siber ini lebih pada pertimbangan agar analisis dapat berjalan seimbang.

Sebelum menjawab beberapa pertanyaan di atas, sebagai pengantar analisis, akan didiskusikan terlebih dahulu beberapa konsep yang digunakan untuk dapat menjawab pertanyaan dari tulisan/kajian ini.

Diskusi Konsep

1. Demokrasi Deliberatif

Penyediaan ruang dan kesempatan untuk berdiskusi berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam tulisan ini dapat dibayangkan sebagai ruang diskusi terbuka untuk publik yang digambarkan dalam demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif diwujudkan dalam sebuah diskusi di ruang publik yang menghasilkan sebuah keputusan kolektif

⁵ Jan Van Dijk, *The Network Society: Social Aspects of New Media*, (London: Sage, 2006), hlm. 7.

⁶ Beberapa ahli yang mengupas tentang perbedaan karakteristik bentuk pesan, cara penyampaian pesan dan efek dari konsumsi pesan terhadap khalayak pada media baru ini diantaranya adalah Joseph Straubhaar and Robert LaRose, *Media Now, Communication Media in the Information Age*. (Belmont: Wadsworth, 2002); John Vivian, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Penadamedia Grup, 2008); Nicholas Gane and David Beer, *New Media: The Key Concepts*. (Oxford&New York: Berg, 2008); David Holmes, *Communication Theory: Media, Technology and Society*, (London: Thousand Oaks, 2005).

dengan menghadirkan berbagai argumentasi yang rasional dan berimbang.⁷ Komunikasi dalam ruang publik dengan prinsip demokrasi deliberatif inilah yang dibayangkan oleh Jurgen Habermas sebagai salah satu saluran kontrol terhadap pemerintahan.

Ruang publik adalah sebuah ranah yang “egaliter, inklusif dan bebas tekanan”. Prinsip egaliter menekankan pada kesamaan hak, kesempatan dan ruang bagi tiap masyarakat untuk mengkritisi setiap hal yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup orang banyak.⁸ Terbuka bagi siapa pun dengan latar belakang apapun adalah ciri inklusif yang dikedepankan dalam ruang publik. Sifat penting lainnya adalah ruang publik harus bebas dari unsur dan kepentingan pemerintah ataupun penguasa pasar. Dengan demikian, ruang publik yang dibayangkan oleh Habermas sebagai sebuah ruang ideal bagi masyarakat untuk tidak hanya sekedar sebagai penonton atau publik yang pasif dalam kehidupan berpolitik.

Konsep demokrasi deliberatif yang disampaikan Habermas berangkat dari hasil analisis yang dilakukan oleh Habermas sendiri dalam melihat perkembangan ruang publik yang hadir sebelum abad ke-20 dan setelahnya. Dari analisis tersebut disebutkan bahwa telah terjadi kemerosotan drastis prinsip “egaliter, inklusif dan bebas tekanan” yang selama ini menjadi ciri dari ruang publik. Kondisi ini dipengaruhi oleh hadirnya konsep negara kesejahteraan, di mana dalam konsep tersebut negara dan pemilik modal mengklaim memiliki hak dan kuasa untuk menjaga stabilitas politik demi terciptanya stabilitas ekonomi. Dengan demikian, kuasa ini berujung pada upaya membentuk dan mengontrol opini publik, sehingga tidak memberikan ruang dan mematikan sensitifitas publik terhadap persoalan-persoalan politik. Kondisi tersebut juga berlangsung di Indonesia selama masa Orde Baru. Jargon stabilitas ekonomi telah menutup ruang kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan bahkan berkumpul untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Gejolak-gejala

politik dalam bentuk suara-suara protes terhadap penguasa dianggap akan memberikan dampak buruk pada kestabilan

Deliberatif dalam konteks demokrasi adalah upaya untuk memposisikan tatanan sosial politik agar sesuai dengan kebutuhan publik dalam menyentuh efek kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dan karenanya baru bisa dinilai jika telah berhubungan dengan konteks.⁹ Beberapa ahli yang membahas terkait dengan demokrasi deliberatif sesungguhnya menyepakati unsur utama dari deliberatif itu sendiri, yakni menolak asumsi dasar bahwa demokrasi tidak lebih dari sekadar proses dalam pemilihan umum karena dalam proses pembuatan kebijakan publik setelah pemilu, harus melalui serangkaian komunikasi yang berorientasi pada kesetaraan dialog setelah dilakukannya penghitungan suara. Emmanuel Grey menyebutkan bahwa dari kesemua ahli yang membahas konsep deliberatif ini juga menyepakati bahwa aspek-aspek dari demokrasi deliberatif adalah: adanya partisipasi, kebebasan dan kesetaraan, ketertarikan pada kebaikan bersama, dan keinginan untuk melakukan voting.¹⁰

Salah satu ahli yang memberikan makna komunikatif dalam penjelasan deliberatif adalah Jurgen Habermas, ia menyebut bahwa demokrasi deliberatif merupakan ruang publik¹¹ yang memungkinkan bagi masyarakat umum untuk dapat mengemukakan pendapat dan mengkritisi kinerja pemerintah. Secara garis besar, demokrasi deliberatif merupakan teori normatif yang menawarkan sebuah mekanisme yang mana masyarakat sipil dapat memperkuat demokrasi dan mengkritik lembaga pemerintah yang berjalan ketika tidak sesuai dengan norma-norma atau aturan yang ada.¹² Demokrasi

⁷ John Elster (Ed), *Deliberative Democracy*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 1998), hlm. 8.

⁸ Lincoln Dahlberg, “The Internet, Deliberatif Democracy and Power: Radicalizing Publik Sphere”, *International Journal of Media and Cultural Politics* Vol. 3 No. 1, 2007, hlm. 49.

⁹ Muhammad Faishal, “Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Sebuah Pencarian Teoretik”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, Juli 2007, hlm. 5.

¹⁰ David Emmanuel Gray, *Social Choice in Deliberatif Democracy*, Tesis pada Carnegie Mellon University, Department of Philosophy, Januari 2004, revised 2005, dalam Muhammad Faishal, “Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Sebuah Pencarian Teoretik”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, Juli 2007, hlm. 5.

¹¹ Ruang publik inilah yang menjadi titik tekan komunikasi dalam pengembangan demokrasi deliberatif yang dimaksudkan oleh Habermas.

¹² Simone Chambers, “Deliberatif Democratic

deliberatif berpusat pada diskusi dan akuntabilitas. Melalui demokrasi deliberatif, diharapkan demokrasi diskusi-sentris menggantikan demokrasi voting-sentris. Jika demokrasi voting-sentris hanya berpusat pada pemberian suara dalam memutuskan sebuah persoalan, maka demokrasi diskusi-sentris lebih mengedepankan pada proses pembentukan opini dan argumentasi-argumentasi, yang pada akhirnya menghasilkan pilihan-pilihan dalam perumusan sebuah kebijakan.

Ketika mendiskusikan demokrasi deliberatif dalam konteks sistem pemerintahan presidensial, tidak berarti mengabaikan keberadaan lembaga legislatif. Dalam menjalankan perannya, anggota legislatif justru idealnya memiliki tanggung jawab kepada konstituennya selain kepada partai politik yang mengusungnya. Dengan demikian, saluran komunikasi dalam hal pengawasan kinerja anggota dewan dari konstituennya pun harus dibangun. Meskipun proses pemberian mandat antara presiden dan anggota legislatif dalam sistem ini berbeda, namun legislatif merupakan *partner* sekaligus pengawas dari kinerja presiden pula. Hal ini terkait dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh parlemen dalam merumuskan kebijakan sebagai dasar pijakan berbagai program kerja yang disusun oleh presiden dan kabinetnya

Ruang Publik pada Media Siber

Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai, “..sebuah arena, pemerintahan yang independen (walaupun menerima dana dari negara) dan juga menikmati otonomi dari partisan-partisan ekonomi, yang didedikasikan untuk debat rasional (contohnya untuk membicarakan atau mendiskusikan sesuatu tanpa paksaan atau manipulasi) dan yang dapat dimasuki dan diperiksa oleh semua warga negara, dan di sinilah, di dalam ruang publik, opini publik dapat dibentuk.¹³ Pengertian ruang publik dalam konteks ini adalah sebuah ruang termpat terjadinya pertukaran bahasa, terutama bahasa politik, berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Theory”, <http://www.chinesedemocratization.com/materials/4Simone%20Chambers%20on%20%20deliberatif%20democracy.pdf>, hlm. 2, diakses pada tanggal 2 September 2013.

¹³ Dikutip dari Frank Webster, *Theories of Information Society*, (London: Routledge, 1995), hlm. 102.

Hal terpenting yang menjadi kunci dari ruang publik adalah informasi yang tersedia dan akses terhadap informasi tersebut. Pihak-pihak yang terlibat di dalam ruang publik tersebut memberikan argumentasinya dengan ekspilisit, menggunakan bahasa-bahasa yang rasional dan komunikatif, yang kemudian disebarkan kepada publik, yang mana memiliki akses penuh atas diskusi dan debat terhadap wacana tersebut.

Komunikasi yang terbentuk dalam ruang publik tersebut menurut Habermas harus berada pada kondisi komunikasi ideal, di mana tidak ada satu pihak pun yang dibiarkan menggunakan cara-cara manipulasi, pemaksaan dan bahkan dominasi. Sebaliknya, komunikasi yang dibentuk adalah sebuah wacana yang fair, dalam upaya menciptakan konsensus bersama dalam memecahkan berbagai persoalan dan menentukan tujuan bersama melalui cara argumentasi yang rasional.¹⁴ Semakin rendahnya keinginan media konvensional untuk menyediakan ruang publik ideal dan demokratis membuat masyarakat dan warga negara pun mencari-cari format ruang publik seperti apa yang mampu menumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap persoalan politis dan kemudahan terhadap akses informasi yang disediakan.

Pengemasan informasi politik yang mengarah pada satu frame opini – yang sesuai dengan kehendak pemilik media – seperti yang berlangsung pada media konvensional dewasa ini diharapkan dapat diimbangi dengan kehadiran media baru. Howard Rheingold mencatat dalam bukunya, bahwa aspek politik dari CMC (Computer Mediated Communication) terletak pada kemampuannya untuk menantang media komunikasi yang telah dimonopoli oleh kekuatan ekonomi dan politik, dan kemampuannya untuk merevitalisasi kembali demokrasi yang berpusat pada rakyat.¹⁵ Kekuasaan yang berpusat pada rakyat diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata lewat ruang publik media baru.

Ruang publik demokratis yang dibayangkan oleh Habermas adalah ruang

¹⁴ Lihat Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action Volume Two: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*, (a.b Thomas McCarthy), (Boston, Beacon Press, 1987).

¹⁵ Howard Rheingold, *Virtual Community: Finding Connection in Computerized World*, (London: Secker & Warburg, 1994), hlm. 13.

publik yang tetap mengandalkan tujuan utama dari demokrasi tersebut, yaitu terbentuknya konsensus bersama dengan didasarkan aturan main yang jelas terkait diskusi dan debat yang tercipta di ruang publik dunia maya. Tingginya makna kebebasan dalam berkomunikasi lewat media baru memunculkan anggapan bahwa sifat individualis para pengguna media baru justru menjadi hambatan dari prinsip utama kebebasan dalam konteks berdemokrasi, yaitu kebebasan dengan aturan main dan bertujuan menghasilkan konsensus bersama. Menurut Timothy Leary, dalam bukunya *Chaos and Cyber-culture*, di media siber, kekuasaan dibangun berdasarkan orotitas pribadi seseorang. Ia juga menyatakan, makna tersirat dari media baru adalah ide tentang kemerdekaan dan kebergantungan pada diri sendiri, seseorang yang mengatur dirinya sendiri. Semboyan utama dari khalayak media baru adalah berpikirlah untuk dirimu sendiri dan pertanyakan selalu otoritas.¹⁶

Anggapan yang dilontarkan oleh Leary tersebut sebenarnya bisa dijadikan sebagai tantangan bagi terciptanya ruang publik demokratis di media baru (media siber), bukan malah melunturkan peluang yang diberikan oleh media siber untuk terciptanya ruang publik yang demokratis. Karena pada prinsipnya, tidak ada otoritas yang hilang, namun otoritas yang seyogyanya di media konvensional berada di tangan pemerintah, partisan politik dan pemilik media, dalam ruang media siber telah berpindah ke tangan individu. Dengan demikian, media siber tetap mampu memberikan harapan untuk mengembalikan kekuatan di tangan rakyat dalam proses berdemokrasi.

Untuk menganalisis ruang publik yang tersedia pada media siber (situs dan media sosial) yang digunakan oleh lembaga politik dan elit politik di Indonesia dalam tulisan ini berpegang pada pemahaman utama yang disampaikan oleh Habermas di atas. Keberlanjutan berdemokrasi pasca dilaksanakannya salah satu prinsip utama berdemokrasi, yaitu pemilihan umum untuk penggantian elit/pemerintahan, selayaknya dapat terus diupayakan dan tentunya dapat melihat berbagai media alternatif yang ditawarkan

oleh perkembangan teknologi. Tulisan ini tidak hendak melakukan penilaian - ada atau tidak ada, tepat atau tidak tepat dan benar atau salah – terhadap beberapa objek yang dijadikan bahan analisis. Seperti yang disampaikan sebelumnya, tulisan ini hendak melihat seperti apakah ruang publik demokratis yang berlangsung pada media siber (situs lembaga politik dan media sosial elit politik) di Indonesia saat ini.

Pembahasan

Media Siber Dalam Dunia Politik Di Indonesia

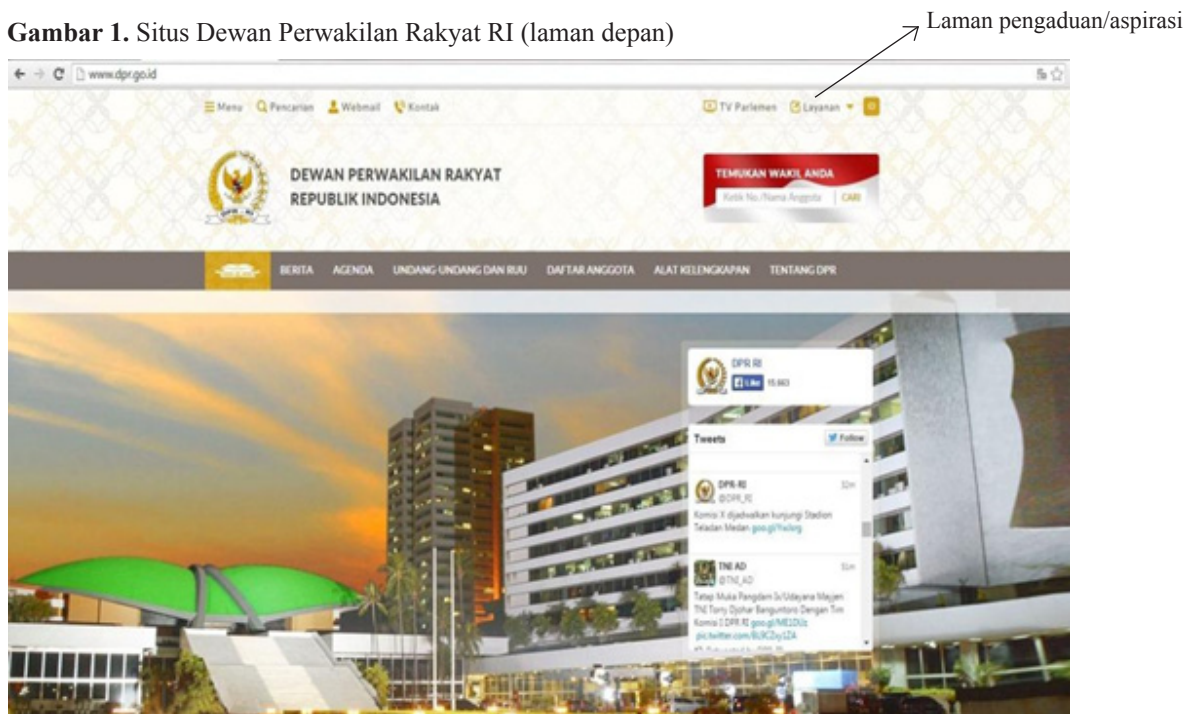
Terdapat beberapa bentuk siber media, di antaranya: (1) Situs (*Web Site*); (2) E-mail; (3) Forum di internet (*buletin boards*); (4) Blog; (5) Wiki; (6) Aplikasi pesan; (7) Internet “broadcasting” (8) Peer to peer; (9) The RSS; (10) MUDs dan (11) Media Sosial (*Social Media*). Dikarenakan keterbatasan waktu dan ruang, maka tulisan ini hanya mengambil dua bentuk dari beberapa media siber di atas, yaitu situs dan media sosial. Melalui analisis sederhana pada situs dan media sosial yang menjadi objek kajian dapat memberikan gambaran pemanfaatan media siber oleh elit politik dan lembaga demokrasi Indonesia serta peluang bagi terciptanya ruang publik politis yang demokratis pada kedua bentuk media siber tersebut.

1. Situs (Web Site)

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, bahwa lembaga legislatif merupakan salah satu dari bentuk lembaga politik demokratis, maka situs pertama yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah situs yang dimiliki oleh lembaga perwakilan di Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (www.dpr.go.id). Melalui situs yang dimiliki oleh DPR RI tersebut, akan dilihat bagaimana gambaran atau kondisi ruang publik yang disediakan dalam laman situs tersebut. Berikut adalah cuplikan dari halaman depan (*home page*) dari situs DPR RI: (Lihat Gambar 1)

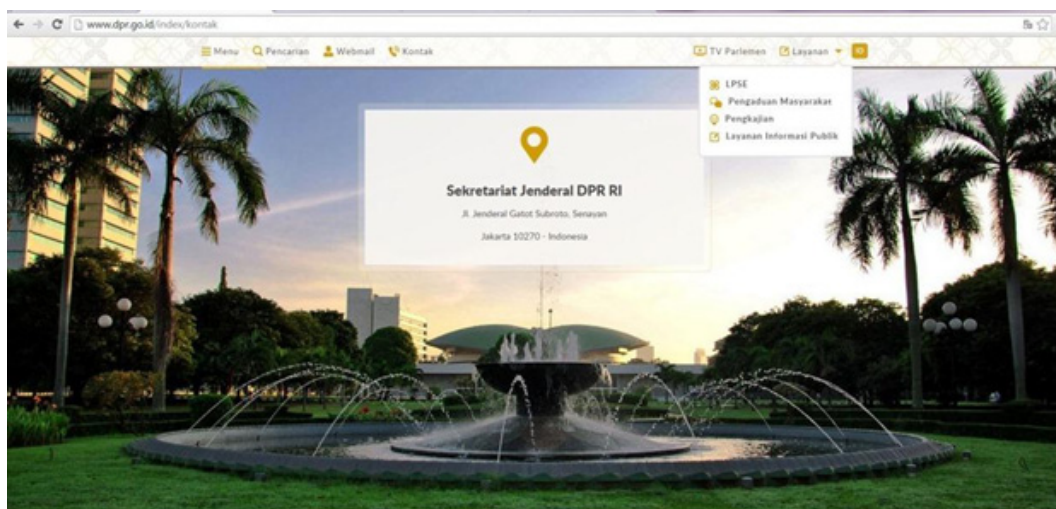
¹⁶ Reza Antonius Alexander Wattimena, “Menggagas Cyberspace Sebagai Ruang Publik Virtual yang Emansipatif,” dalam Mudji Sutrisno, In Bene dan Hendar Putranto (Ed), *Cultural Studies: Tantangan bagi Teori-teori Besar Kebudayaan*, (Depok: Koekoesan, 2008), hlm. 241.

Gambar 1. Situs Dewan Perwakilan Rakyat RI (laman depan)



Sumber: www.dpr.go.id. Diakses pada tanggal 7 September 2013.

Gambar 2. Situs Dewan Perwakilan Rakyat RI (laman pilihan layanan)



Sumber: www.dpr.go.id. Diakses pada tanggal 7 September 2013.

Pada halaman depan dari situs dpr.go.id tampak adanya pilihan informasi yang dapat dipilih oleh pengunjung situs tersebut, yaitu BERITA, AGENDA, UNDANG-UNDANG DAN RUU, DAFTAR ANGGOTA, ALAT KELENGKAPAN, TENTANG DPR. Seluruh pilihan informasi tersebut berisi tentang kegiatan dan perkembangan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh anggota dewan beserta alat kelengkapannya. Sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, bahwa situs ini memuat informasi, maka sifat komunikasi yang berjalan pada situs ini setelah penulis telusuri

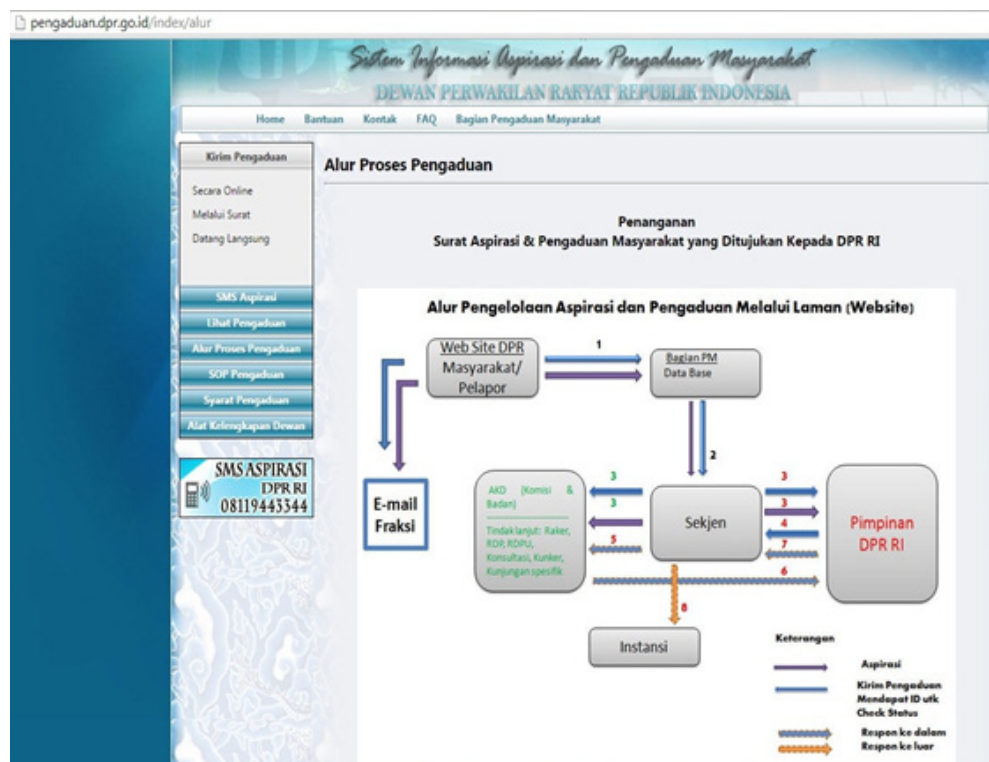
bersifat satu arah. Di mana pengelola situs sebagai pihak yang memproduksi pesan atau informasi dan khalayak yang menjadi pihak yang mengkonsumsi pesan tersebut. Tidak ditemukan ruang bagaimana publik dapat berdiskusi terkait berbagai produk yang akan dan telah dihasilkan oleh lembaga legislatif tersebut.

Laman yang dapat dijadikan tempat bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya adalah dengan membuka pilihan “layanan”, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2 (Lihat Gambar 2).

Jika pilihan “layanan” tersebut diklik, maka akan muncul empat pilihan laman informasi, yaitu LPSE, Pengaduan Masyarakat, Pengkajian dan Layanan Informasi Publik seperti yang tampak pada Gambar 2 di atas. Laman “Pengaduan Masyarakat” adalah laman yang disediakan secara resmi dalam situs ini untuk masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasinya. Berikut adalah tampilan laman dari “Pengaduan Masyarakat”:

belum dapat dimaksimalkan pada situs milik lembaga legislatif Indonesia ini. Pada laman pengaduan sebenarnya dapat dibuat suatu ruang yang memberikan peluang konstituen untuk berdiskusi secara bersama-sama terkait RUU yang sedang dikerjakan oleh anggota legislatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan isu terkait suatu tema RUU saat ini sangat dinamis di tingkat masyarakat. Kebaruan informasi yang dapat langsung diakses oleh anggota dewan

Gambar 2. Situs Dewan Perwakilan Rakyat RI (laman Pengaduan)



Sumber: www.dpr.go.id. Diakses pada tanggal 7 September 2013.

Pada kutipan laman “Pengaduan Masyarakat” di atas juga tampak penjelasan alur pengelolaan aspirasi dan pengaduan melalui situs DPR RI. Pada alur tersebut tampak bahwa ruang yang diberikan pada publik terbatas pada penyampaian aspirasi satu arah kepada lembaga legislatif. Tidak ditemukan ruang untuk khalayak agar dapat mendiskusikan aspirasinya tersebut dengan khalayak lain dan bahkan dengan anggota dewan. Meskipun jalannya proses aspirasi dapat diketahui melalui kotak “lihat pengaduan”, namun hanya sebatas informasi pengecekan posisi pada tahapan mana aspirasi tersebut, masih pada bagian data base ataukah sudah masuk pada tahap pembahasan pada alat kelengkapan dewan atau pada sekjen atau pimpinan DPR. Komunikasi dua arah yang diharapkan hadir pada media siber

menjadi hal yang amat membantu ketepatan substansi dari RUU yang sedang dibahas oleh dewan. Situs sebagai bagian dari media siber memberikan jawaban atas kebaruan informasi yang terus menerus, sepanjang khalayak diberikan ruang untuk menyampaikan dan mendiskusikan informasi tersebut.

Situs dalam hal ini tak hanya dimiliki atau dibuat oleh sebuah lembaga atau organisasi. Perorangan pun saat ini telah membuat situs yang menginformasikan segala sesuatu hal mengenai pemilik situs tersebut. Informasi yang disajikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi sebuah jabatan atau pekerjaan yang ia jalankan. Penulis menemukan beberapa nama politisi yang saat ini tidak lagi hanya memanfaatkan media sosial sebagai bentuk

sumber informasi mengenai dirinya, tetapi juga mengandalkan keberadaan jenis media siber “situs”. Sebagai contoh, penulis mengambil secara acak dari sebuah situs yang dibuat oleh politisi perempuan di Indonesia. Penulis memilih politisi dari Partai PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka (RDP). Pemilihan dari politisi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa beliau merupakan salah satu dari sekian anggota legislatif perempuan di Indonesia yang sangat lantang memperjuangkan hak-hak kaum marjinal, khususnya kaum buruh dan perempuan. Perjalanan yang ia lalui juga cukup berliku. Dimulai dengan berkarir dalam dunia politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lalu memutuskan untuk berpindah ke PDI Perjuangan hingga saat ini. Pertarungan memperebutkan jabatan politis tak hanya ia rasakan pada tingkat legislatif, tetapi juga pada jabatan eksekutif, yaitu pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat (Gubernur) Tahun 2013. Laman situs yang dimiliki oleh Rieke dapat dilihat pada gambar di bawah ini (Lihat Gambar 3).

Gambar 3. Situs Politisi PDI Perjuangan- Rieke Diah Pitaloka (www.riekediahpitaloka.org)



Dalam situs tersebut tampak bahwa laman *content* yang disediakan adalah Home, Berita, Gagasan Politik, Videos Gallery, Lensa Juang, Budaya Rakyat dan Profile. Kutipan berita dari media mainstream masih mendominasi isi dari laman Berita dan Gagasan Politik. Sementara laman Videos Gallery dan Lensa Juang, memuat

foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh RDP. Sebagai pejuang hak kaum perempuan dan buruh di parlemen, belum terlihat ruang diskusi yang dibuka khusus dalam satu laman di situs ini terkait isu-isu perempuan dan perburuhan yang diusung oleh RDP. Ketiadaan laman diskusi ini memperlihatkan kondisi situs yang hanya mempertontonkan aktivitas si pemilik situs dengan ciri komunikasi satu arah seperti yang terjadi pada media konvensional. Ruang diskusi yang idealnya mampu dirancang di dalam situs ini sama sekali tidak dimaksimalkan.

Pemanfaatan yang belum maksimal pada situs DPR RI dan politisi RDP di atas tentunya bukanlah sesuatu hal yang salah. Hal ini mengingat pada lembaga legislatif dikenal adanya masa reses bagi anggota dewan. Masa inilah yang menjadi kesempatan bagi anggota dewan untuk turun langsung ke wilayah pemilihannya dan berdiskusi atau menghimpun aspirasi konstituen yang ada di sana. Aspirasi yang dikumpulkan, dijanjikan akan ditindaklanjuti dan diperjuangkan oleh anggota dewan setelah ia kembali bertugas.

Dengan adanya mekanisme reses yang masih berjalan aktif hingga saat ini, tidak mengherankan jika pemanfaatan ruang publik pada media siber kurang dimaksimalkan.

Namun, ada hal yang mesti menjadi perhatian penting. Pasca masa reses, publik dan utamanya konstituen tidak dapat lagi

mengawal apakah aspirasi mereka akan dapat ditindaklanjuti oleh anggota dewan bersangkutan, dikarenakan tidak ditemukan lagi ruang untuk dapat berdiskusi secara interaktif dengan anggota dewan dan sesama konstituen dari daerah pemilihan yang sama. Keterlibatan masyarakat untuk membicarakan persoalan-persoalan kehidupan mereka dengan para pembuat kebijakan pun tidak lagi berkelanjutan. Pada titik inilah tujuan dari demokrasi deliberatif atau berkelanjutan mengalami stagnansi.

2. Media Sosial

Media sosial adalah bentuk lain dari media siber yang memberikan beragam fasilitas berkomunikasi secara virtual dengan mudah dan praktis bagi penggunaannya. Penggunaan media sosial yang pada awalnya hanya dijadikan sebagai bagian untuk menghibur diri, ajang “curhat”, bersosialisasi dengan tanpa tatap muka, saat ini telah berada pada level pemanfaatan yang tidak hanya mencakup beberapa hal seperti yang disebutkan penulis sebelumnya. Banyak hal bermanfaat yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup seseorang berawal dari keterlibatannya dalam media sosial. Salah satu bentuk pemanfaatan yang saat ini ramai digunakan adalah penggunaan media sosial untuk keperluan berdagang atau sering disebut dengan “belanja *on-line*”.

Di samping itu, media sosial saat ini juga acap kali digunakan untuk menggalang dukungan atas sebuah perkara/isu. Contohnya pada saat terjadi kisruh antara KPK dan Polri pada Juli 2009, di mana terjadi penahanan dua komisioner KPK oleh Mabes Polri (Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah). Penahanan ini menuai aksi protes dari aktivis/penggiat antikorupsi. Dukungan terhadap KPK pada masa itu mengalir dengan sangat deras. Dukungan nyata tidak hanya datang melalui aksi demonstrasi di beberapa gedung lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan usaha pemberantasan korupsi (utamanya KPK), namun juga mengalir dari media sosial. Diskusi tajam yang membahas isu tersebut pun tak dapat dihindari berlangsung pada media sosial. Munculnya kode #cicakvsbuaya pada media sosial “Twitter” contohnya telah memberikan ruang bagi khalayak pengguna media sosial untuk berpendapat terkait permasalahan tersebut.

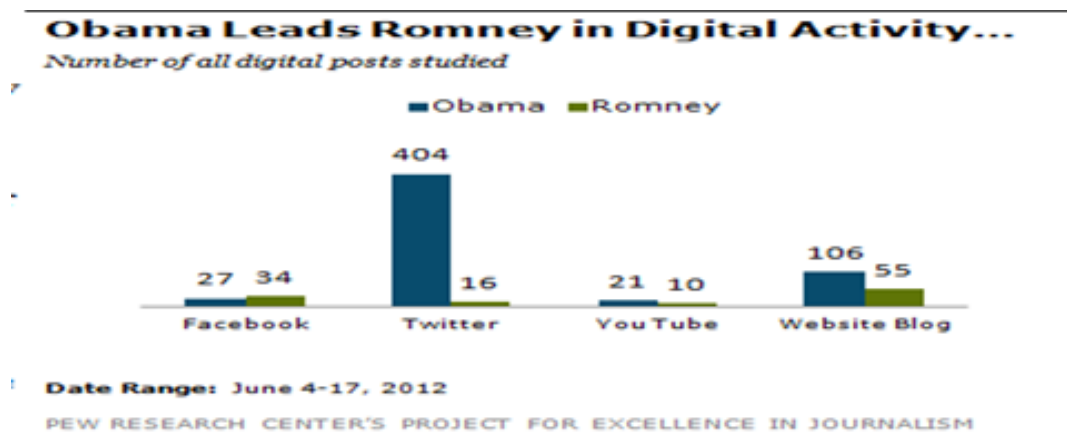
Dalam dunia politik, politisi pun melihat peluang yang cukup menjanjikan dari media sosial sebagai media komunikasinya dengan khalayak. Kita dapat menyaksikan bagaimana semarak dan sistematisnya kampanye melalui media sosial pada saat pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2012 yang lalu. Marketing politik yang dilakukan oleh tim kampanye Obama saat itu telah mampu memberikan sumbangan yang tidak sedikit pada kemenangan Barrack Obama. Pada periode pemilihan Presiden AS Tahun 2012 tersebut, Obama bersama tim kampanyenya amat maksimal melakukan pengemasan isu dan opini masyarakat melalui media sosial. Sebuah lembaga riset jurnalis bahkan merilis hasil perbandingan penggunaan media siber di antara dua kandidat pada masa Pemilihan Presiden AS tersebut.¹⁷ Dari hasil riset yang dilakukan oleh The Pew Research Center’s Journalism Project (PRCJP), tampak bahwa Obama lebih maksimal dalam menggunakan media siber. Baik melalui situs yang memang khusus dibuat untuk keperluan kampanye ataupun melalui media sosial. Hal menarik dalam hasil kajian PRCJP adalah situs Obama tidak memberikan ruang bagi cuplikan-cuplikan berita lewat media mainstream, *content* lebih banyak berisi pembahasan-pembahasan mengenai visi dan misi Obama pada aspek-aspek tertentu. Hal ini sangat jauh berbeda dengan Romney, yang hampir sebagian besar *content* dari situsnya berisi cuplikan berita-berita pada media mainstream, dengan cenderung memperlihatkan hal-hal positif pada Romney dan hal-hal negatif pada Obama.¹⁸ Dalam penelusuran yang dilakukan PRCJP, penggunaan media sosial juga lebih banyak digunakan oleh Obama. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.¹⁹ (Lihat Gambar 4).

¹⁷ “How the Presidential Candidates use the Web and Social Media: Obama Leads but Neither Candidate Engages in Much Dialogue With Voters”, <http://www.journalism.org/2012/08/15/how-presidential-candidates-use-web-and-social-media/>, diakses pada tanggal 15 September 2013.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Gambar 4. Perbandingan Penggunaan Media Internet Antara Dua Calon Pada Masa Pilpres Amerika Tahun 2012.



Sumber: <http://www.journalism.org/2012/08/15/how-presidential-candidates-use-web-and-social-media/>.
Diakses pada tanggal 15 September 2013.

Dinamisnya kampanye Pilpres Amerika melalui media sosial ini sepertinya tidak terjadi pada masa kampanye pilpres terakhir yang digelar oleh bangsa Indonesia. Pada pilpres 2009 yang lalu, geliat kampanye capres-cawapres belum terlihat menggejala pada media siber, khususnya media sosial. Kampanye lebih banyak dilakukan pada media mainstream dan media luar ruang (baliho, spanduk, stiker dan kampanye akbar yang melalui tatap muka). Hal ini sungguh disayangkan, mengingat hingga tahun 2009, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak kurang lebih 30 jutaan.²⁰ Jumlah pemilih yang tercatat pada DPT Pilpres 2009 adalah sebanyak 176.367.056 pemilih.²¹ Meskipun jumlah pengguna internet pada tahun tersebut tidak terlalu besar, artinya hanya sekitar 20% dari jumlah pemilih yang ada, namun peluang untuk menjadikan media internet dalam berkampanye sebenarnya cukup besar. Pasifnya pengguna media sosial dalam membahas persoalan pilpres memperlihatkan bahwa khalayak pengguna media sosial tidak terlalu menaruh perhatian pada isu-isu seputar Pemilu Presiden Tahun 2009. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kondisi ini juga dipengaruhi oleh tidak gencarnya kandidat pada saat itu untuk melakukan kampanye melalui media sosial.

Fenomena penggunaan media sosial pada

²⁰ Data berdasarkan penghitungan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), <http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html#>, diakses pada tanggal 15 September 2013.

²¹ <http://mediacenter.kpu.go.id/berita/643-dpt-pilpres-176367056-orang.html>, diakses pada tanggal 15 September 2013.

kalangan elit politik Indonesia justru mulai menanjak setelah pilpres 2009 dilaksanakan. Penggunaannya masih cenderung untuk kebutuhan pribadi, seperti bersilaturahmi dengan saudara, teman dan kerabat dengan jarak yang jauh. Memaksimalkan penggunaan media sosial untuk keperluan perannya sebagai elit politik ataupun pejabat publik masih cukup sulit ditemukan. Meskipun terdapat komunikasi dengan konstituen, komunikasi yang terbentuk lebih cenderung sekedar basa-basi, lebih banyak seruan atas sebuah persoalan yang dihadapi konstituen dalam kesehariannya, atau sebagai “papan informasi” kepada khalayak terkait kegiatan sang elit. Hal ini tentunya bukanlah hal yang salah, namun sesungguhnya dapat dikatakan sebagai kurang inovatifnya politisi memanfaatkan ruang komunikasi dua arah yang disediakan oleh media sosial. Keterbatasan ruang dan waktu antara wakil rakyat dan konstituennya sungguh dapat diatasi dengan mudah melalui komunikasi pada media sosial ini.

Jika dilihat dengan seksama pada fasilitas yang ada di media sosial, komunikasi dua arah lebih memungkinkan terjadi. Terdapat ruang untuk memberikan komentar (*feedback*) atas status (Facebook) dan *posting-an tweet* (Twitter) yang dimasukkan oleh pemilik akun. Sehingga pada akhirnya pemilik akun sendiri juga akan melakukan respon balik atas *feedback* yang telah terlebih dahulu diberikan oleh orang lain. Kondisi yang saling memberikan respon inilah yang dimaksudkan sebagai komunikasi dua arah. Di samping tersedianya ruang untuk berkomunikasi secara intensif, kapasitas untuk membuka media sosial seperti Facebook

dan Twitter juga jauh lebih ringan, sehingga pengguna internet dapat mengaksesnya dengan mudah hanya melalui ponsel. Berbagai keunggulan yang diberikan oleh media sosial ini, masih dianggap sebagai kondisi yang sebagaimana adanya, tanpa melihat fungsi lain dari fasilitas yang disediakan untuk membentuk interaksi interpersonal yang lebih aktif dan dinamis.

Merujuk pada judul artikel ini yang mengusung konsep presidensial, maka sudah sepatutnya jika kita menelaah bagaimana pemimpin tertinggi di negara ini melihat peluang media sosial untuk menjembatani jarak dan ruang terbatas yang ia miliki ketika hendak berkomunikasi dengan pemilih/rakyatnya. Presiden Indonesia terpilih 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013 yang lalu merilis akun Twitter, Facebook dan *fanpage* miliknya di Youtube.²² Akun Twitter SBY telah terlebih dahulu dirilis pada April 2013 yang lalu, dengan nama SBYudhono.²³ Nama yang sama juga beliau gunakan pada akun fecebook yang beliau miliki. Dalam keterangan terkait pengelolaan akun tersebut, pada sisi kiri dikolom "About" tertulis *Fan page resmi Presiden Ke-6 RI (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono. Dikelola oleh Staf Pribadi. Posting dari Susilo Bambang Yudhoyono ditandai *SBY**.²⁴ Di sebelah nama profil SBY pun terdapat tanda centang. Apabila *pointer mouse* didekatkan ke lambang tersebut, akan muncul kata "Verified Page" yang menandakan bahwa halaman ini sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Facebook yang juga dapat dimaknai bahwa ini sebagai situs resmi milik Presiden SBY.²⁵

Pada akun Facebook yang dimiliki oleh Presiden SBY, penulis mencoba melihat apakah komunikasi dua arah juga tercipta di

sini. Sebagai bahan analisis, penulis mengutip status Presiden SBY yang ditulis pada Tanggal 4 Oktober 2013, terkait penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK. Berikut adalah cuplikan dari pernyataan beliau di linimasanya.

Saya katakan kemarin, penangkapan Ketua MK oleh KPK adalah tragedi politik dan mencoreng nama negara Indonesia. Kita memiliki 2 institusi yang kuat yaitu MK dan KPK. Harapan rakyat amat tinggi. Sepatutnya kepercayaan rakyat tidak dicerai. Sesuai UUD 1945, putusan MK final. Berarti harus dijalankan oleh siapapun. Bayangkan kalau salah. Bayangkan kalau ada korupsinya. Perkara yang ditangani MK sangat penting, tentang undang-undang, sengketa lembaga negara dan sengketa pemilu, dan pembubaran parpol. Mengingat krisis kepercayaan terhadap MK, besok saya mengundang Ketua MPR, DPR, DPD, MA, KY dan BPK untuk membahas situasi ini. Saya ingin mengajak para pimpinan lembaga negara tersebut untuk memikirkan masa depan MK, yang bisa menjaga tegaknya kebenaran dan keadilan. Juga memikirkan bagaimana MK bisa kredibel di mata rakyat, karena rakyat bisa tidak percaya lagi. Meskipun kejadian itu ulah oknum. Perlu pula kita pikirkan bagaimana persyaratan dan mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi. Kalau perlu kita atur dalam Undang-undang. Kita ingin MK menjadi benteng konstitusi dan meluruskan kehidupan bernegara yang dinilai menyimpang. Tanggung jawabnya sangat besar. Bagi saudara yang ingin memberikan rekomendasi singkat tentang masa depan MK yang kita harapkan, silahkan #SaranMK. *SBY*²⁶

Perlu dijelaskan bahwa, setiap status yang diakhiri oleh *SBY*, menandakan bahwa status tersebut ditulis langsung oleh Presiden SBY. Penelusuran dilanjutkan dengan melihat kolom *comment* pada status tersebut. Tercatat 9.543 orang yang memberikan komentarnya terkait kasus MK yang saat itu hangat diperbincangkan. Sebagian besar berisi tentang hukuman berat yang mestinya telah diberlakukan bagi para koruptor, bahkan sampai dengan hukuman mati. Dari kesemua komentar tersebut, tak ada satupun yang direspon oleh Presiden SBY. Tidak terlihat sebuah suasana diskusi antara Presiden SBY

²⁶ Dikutip dari *wall* akun Facebook SBYudhoyono, <https://www.facebook.com/SBYudhoyono>, diakses pada tanggal 17 September 2013..

²² Pemberitaan terkait rilis akun *media sosial* yang dimiliki oleh Presiden SBY ini dapat dilihat pada <http://tekno.kompas.com/read/2013/07/05/1845346/inikah.akun.facebook.dan.youtube.president.sby>, diakses pada tanggal 17 September 2013.

²³ Dengan tautan https://twitter.com/SBYudhoyono/with_replies, diakses pada tanggal 17 September 2013.

²⁴ Lihat <https://www.facebook.com/SBYudhoyono>, diakses pada tanggal 17 September 2013.

²⁵ Tanda konfirmasi ini diletakkan mengingat ada beberapa nama akun Facebook yang menggunakan nama yang hampir sama dengan nama Presiden SBY, meskipun akun tersebut tidak dibuat secara resmi oleh SBY.

dengan “friends” nya untuk menemukan solusi terbaik membenahi MK yang telah tercoreng kehormatannya.

Pada saat yang sama penulis juga mencoba menelusuri isu yang sama dalam akun Twitter yang dimiliki oleh sang presiden. Tanggal 4 hingga 5 Oktober 2013, SBY secara aktif mengirimkan *tweet* yang juga berisi tentang persoalan penangkapan Akil Mochtar oleh KPK. Namun, kondisi laman Twitter yang tidak seperti Facebook²⁷ menyebabkan para “followers” dari akun @SBYudhoyono hanya bisa memberikan umpan balik dengan melakukan *retweet*, yang mana di akhir *retweet* memberikan tanda pagar (#) sehingga penerima *retweet* dapat langsung mengidentifikasi bahwa isi pesan berada pada isu atau tema yang sama. Jadi, dapat dikatakan komunikasi yang tercipta di ruang Twitter ini sendiri tidak berada pada kondisi yang sama, di mana semua pihak tidak berada pada kolom dan ruang yang sama untuk memberikan komentarnya. Setiap *retweet* yang diberikan oleh pengguna Twitter sebagai *follower* SBY akan masuk secara bergantian dan seringkali bertumpuk. Sehingga pemilik akun yang berada di dalam lingkaran tersebut tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya satu per satu.

Memperhatikan umpan balik dari status Facebook maupun *tweet* pada Twitter, tampak bahwa pihak-pihak yang memberikan komentar belum berada dalam perspektif mengusung secara bersama sebuah isu khusus, yang kemudian menghadirkan argumentasi-argumentasi rasional, sehingga pada akhirnya akan memberikan ruang hadirnya solusi cerdas terkait persoalan yang dikomentari. Dengan demikian, peluang yang dijanjikan oleh media baru ini terkait ruang publik demokrasi deliberatif tampaknya masih belum terimplementasikan dengan baik pada contoh kasus di atas.

²⁷ Pada laman Facebook, kolom untuk memberikan komentar terhadap status yang dibuat oleh pemilik akun, berada pada satu halaman yang sama dan tidak diselingi oleh status dari pemilik akun yang menjadi teman dari pihak yang memberikan komentar. Hal ini berbeda dengan apa yang ada di Twitter. Mengingat laman Twitter menampilkan satu per satu dari komentar atas kolom “what’s happening” yang dibuat oleh pemilik akun, dan kolom ini akan terus ditimpa dan diselingi oleh “what’s happening” yang dibuat oleh pemilik lain.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas tampak belum ada sebuah terobosan yang terpikirkan oleh elit ataupun lembaga demokrasi di Indonesia, ketika membuat situs pribadi atau lembaganya, akan mengarah pada ruang publik yang memberikan jaminan seluruh anggotanya untuk berdiskusi secara rasional dan terarah. Ruang publik demokrasi deliberatif yang diharapkan oleh Habermas tentu sangat jauh berbeda dengan apa yang saat ini berkembang di Indonesia. Demokrasi deliberatif dalam sebuah ruang publik di dunia maya mensyaratkan adanya keterlibatan semua pihak, dengan latar belakang apapun, sepanjang dapat memberikan argumentasi yang logis dan rasional. Kemudian juga mensyaratkan keanggotaan yang tidak cenderung eksklusif dan menjunjung tinggi peradaban manusia dalam hal kesantunan.

Meskipun Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang sukses melembagakan demokrasi melalui pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum berkala, dilindunginya hak berpendapat, terdapatnya lembaga politik (partai politik), namun mekanisme pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan parlemen yang bertanggung jawab pada rakyatnya masih cukup sulit untuk dilembagakan dalam cita-cita demokrasi yang ideal. Peran ruang publik sebagai salah satu sarana pengimplementasian demokrasi deliberatif masih belum benar-benar dimaksimalkan, khususnya dengan pemanfaatan media siber. Ruang publik membuat rakyat akan benar-benar merasakan bahwa mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan tetapi juga menjadi salah satu aktor yang memberikan pengaruh terhadap perumusan kebijakan. Jadi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan sepenuhnya dapat diwujudkan. Tentunya dengan terbukanya akses terhadap media internet bagi seluruh masyarakat, memberikan peluang yang cukup menjanjikan demi terciptanya ruang publik demokrasi deliberatif di Indonesia. Tentu saja, mewujudkan hal tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hambatan yang akan dihadapi, namun akan banyak peluang yang bisa dimaksimalkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menghadirkan ruang publik yang memiliki prinsip demokrasi deliberatif di media siber tidaklah mudah. Sebelum media internet hadir

pun, ruang publik dalam konteks tatap muka secara langsung yang ideal saat ini pun sulit diwujudkan. Namun, perlu diingat banyak faktor yang menjadi penghambat dibentuknya ruang publik di kehidupan nyata, justru dapat diatasi dengan kehadiran dunia maya. Contohnya saja persoalan jarak dan waktu, meskipun seseorang berada di ujung timur Indonesia ia tetap dapat berkomunikasi dengan saudaranya secara langsung yang berada di ujung barat Indonesia. Kemudian persoalan psikologis anggota diskusi yang dilatarbelakangi oleh usia, pendidikan dan sosial budaya dapat ditutupi oleh dunia maya. Tidak jarang, seseorang yang lebih muda usianya atau memiliki riwayat pendidikan yang tidak terlalu cemerlang, merasa rendah diri untuk berdiskusi secara langsung dengan orang-orang dengan usia yang lebih tua dan pendidikan yang lebih baik. Prinsip kesetaraan menjadi penting dalam berdiskusi di dunia media siber.

Inilah sebenarnya yang dapat dilihat sebagai peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan para penggiat demokrasi untuk memanfaatkan dunia maya. Peluang lainnya dapat penulis gambarkan dalam beberapa rumusan berikut ini. *Pertama*, jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini semakin bertambah. Hingga tahun 2013 ini, pengguna internet di Indonesia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh APJII mencapai sekitar 80 jutaan netizen. Di mana rata-rata pengguna internet ini adalah tipe netizen yang aktif di media sosial. Pembentukan grup yang fokus pada isu tertentu pada akun Facebook dapat menjadi salah satu peluang memaksimalkan media sosial untuk menciptakan ruang publik itu sendiri.

Kedua, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh APJII juga, jumlah penyedia jasa internet hingga saat ini semakin bertambah. Tak hanya menjangkau masyarakat kelas menengah di wilayah perkotaan, tetapi juga masyarakat kelas bawah yang berada di pedesaan. *Ketiga*, semakin terjangkau harga perangkat elektronik penunjang akses internet. Kondisi seperti ini tentunya diharapkan akan mampu memudahkan masyarakat dari kelas ekonomi apapun untuk terlibat aktif dalam media siber. Peluang *keempat*, yang juga menjadi perhatian penting adalah kenyataan bahwa semakin meningkatnya tingkat *melek* politik di masyarakat, khususnya pembicaraan yang berlalu-lalang di dunia maya. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan semakin tingginya perhatian pengguna internet terhadap

persoalan-persoalan yang menyangkut etika dari politisi dan lembaga pemerintahan seperti yang penulis diskusikan pada pembahasan sebelumnya.

Di samping cukup banyak peluang yang dapat menunjang kehadiran ruang publik dan demokrasi deliberatif di Indonesia, tidak sedikit pula hambatan yang mampu menutupi peluang-peluang yang telah disebutkan sebelumnya. *Pertama*, meskipun jangkauan dari jaringan internet telah menyentuh seluruh kelas sosial yang ada di dalam masyarakat, namun pengguna aktif dari internet sendiri di Indonesia masih pada golongan kelas menengah dan terpelajar. Khususnya yang mampu memanfaatkan peluang *social network* untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kondisi ini setidaknya juga disebabkan oleh masih tingginya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan akses internet yang memadai dan berkecepatan tinggi. Sehingga golongan menengah ke atas menjadi kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan biaya yang relatif tidak murah tersebut. Sehingga hanya kelompok inilah yang memiliki ruang akses yang lebih memadai untuk terlibat aktif dalam perbincangan politik yang intens di dunia maya.

Kendala *kedua* adalah, jaringan internet yang saat ini sudah ada di Indonesia belum mampu menjangkau secara cepat dan menyeluruh ke wilayah terpencil yang justru jadi sasaran empuk manipulasi kebijakan yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat. Hal *ketiga* yang menjadi hambatan dalam memanfaatkan media siber untuk menciptakan ruang publik deliberatif adalah iklim berdemokrasi yang sehat, dalam artian tidak menghujat, masih cukup sulit untuk diimplementasikan. Masih banyak pengguna internet yang mengasosiasikan kebebasan dalam demokrasi sebagai kebebasan mutlak dalam berpendapat. Kebebasan yang terkadang mengabaikan cara-cara yang cerdas dan santun, tidak tendensius, berpendapat tidak berdasarkan data valid dan yang terpenting adalah kritik yang disampaikan tidak mengarah kepada upaya perbaikan terhadap sebuah kondisi atau seseorang yang dianggap tidak baik.

Meskipun diskusi dalam ruang publik di media internet dapat dibangun sedikit demi sedikit, hal yang juga perlu diingat adalah ruang publik demokrasi deliberatif tetap memerlukan aturan-aturan main dalam berdiskusi. Pemimpin

diskusi harus tetap ada untuk mengawal berjalannya diskusi sehingga dapat mencegah munculnya pendapat-pendapat yang bernuansa saling merendahkan, menghina, mengabaikan penghormatan terhadap unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Golongan).

Dari seluruh peluang maupun hambatan yang telah dijelaskan di atas, menghadirkan ruang publik demokrasi deliberatif di dunia maya bukan pekerjaan mudah. Hal terpenting yang patut menjadi perhatian adalah merubah paradigma elit dan pemimpin bangsa, bahwa rakyat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berdemokrasi. Demokrasi yang mendekati ideal adalah demokrasi yang tidak hanya berhenti pada demokrasi prosedural, namun berlanjut pada demokrasi substansial. Hal ini dapat dicapai dengan langkah memadukan gaya pemerintahan *top-down* dan *bottom-up* melalui media siber.

Daftar Pustaka

Buku

- Bene, In dan Hendar Putranto (Ed), 2008, *Cultural Studies: Tantangan bagi Teori-teori Besar Kebudayaan*, Depok: Koekoesan.
- Budiarjo, Budiarjo, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dijk, Jan Van, 2006, *The Network Society: Social Aspects of New Media*. (London: Sage).
- Elster, John (Ed), 1998, *Deliberatif Democracy*, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Habermas, Jurgen, 1987, *The Theory of Communicative Action Volume Two: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*, (a.b Thomas McCarthy), Boston: Beacon Press.
- Rheingold, Howard, 1994, *Virtual Community: Finding Connection in Computerized World*, London: Secker & Warburg.
- Webster, Frank, 1995, *Theories of Information Society*, London: Routledge.

Jurnal

- Dahlberg, Lincoln. 2007. "The Internet, Deliberatif Democracy and Power: Radicalizing Publik Sphere". *International Journal of Media and Cultural Politics* Vol. 3, No. 1.

- Faishal, Muhammad. 2007. "Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Sebuah Pencarian Teoretik". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 11, No. 1.

Laporan dan Makalah

- Pabottingi, Mochtar. 2002. *Lima Palang Demokrasi Satu Solusi: Rasionalitas dan Ototentrisitas dari Sisi Historis-Politik di Indonesia*. Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama Puslitbang Politik dan Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Surat Kabar dan Website

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2013. "Indonesia Internet Users". <http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html#>.
- Chambers, Simone. "Deliberatif Democratic Theory". <http://www.chinesedemocratization.com/materials/4Simone%20Chambers%20on%20%20deliberatif%20democracy.pdf>.
- Facebook. 2013. <http://www.facebook.com/SBYudhoyono>.
- Kompas.com. 2013. "Inikah Akun Facebook dan YouTube Presiden SBY?". <http://tekno.kompas.com/read/2013/07/05/1845346/inikah.akun.facebook.dan.youtube.president.sby>.
- Media Center KPU. 2013. "634 DPT Pilpres". <http://mediacenter.kpu.go.id/berita/643-dpt-pilpres-176367056-orang.html>.
- Nugroho, Yanuar. "Ketiga kelompok tersebut menguasai 77 persen peta kepemilikan media di Indonesia," katanya. <http://www.tempo.co/read/news/2014/05/22/090579547/Industri-Media-Massa-Makin-Terkonsentrasi>.
- Pew Research Center. 2012. "How the presidential Candidates Use the Web and Social Media". <http://www.journalism.org/2012/08/15/how-presidential-candidates-use-web-and-social-media/>.
- Transparency Internasional. 2013. "Corruption Perception Index 2013". <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>.
- Twitter. 2013. https://twitter.com/SBYudhoyono/with_replies.